

Tindakan-Tindakan Negara untuk Mengatasi COVID-19 Harus Responsif Gender

oleh Tim Akses ke Keadilan untuk Perempuan dari International Commission of Jurists

Saat pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, banyak pemerintah memperkenalkan spektrum tindakan-tindakan untuk membatasi penyebaran virus corona baru, termasuk larangan perjalanan, penguncian, jam malam, dan penutupan sekolah, tempat kerja dan perbatasan. Meskipun penting bahwa Negara bertindak tegas dalam melakukan kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak atas kehidupan dan kesehatan semua orang selama pandemi ini, adalah hal setara bahwa mereka melakukannya dengan cara yang sesuai dengan hak asasi manusia, agar tidak menambah bahaya yang ditimbulkan langsung oleh virus. Ini mencakup, antara lain, bertindak dengan cara yang memberikan perlindungan yang sama dan tidak diskriminatif. Mematuhi prinsip-prinsip ini membutuhkan mempertimbangkan dampak gender dan menyediakan tanggapan-tanggapan spesifik gender.

Namun, sejumlah langkah yang saat ini diambil oleh para pemerintah di seluruh dunia untuk mencoba membatasi penyebaran virus dapat diperkirakan akan memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena itu secara tidak proporsional berpengaruh akan penikmatan perempuan atas hak-hak sosial dan ekonomi. Banyak perempuan penyandang disabilitas, pengungsi, migran, tahanan, yang hidup dalam kemiskinan dan atau yang termasuk kelompok etnis minoritas, ras, agama atau seksual mengalami atau kemungkinan besar akan mengalami berbagai bentuk diskriminasi selama masa krisis ini.

Apa Arti #DiRumahAja bagi Para Perempuan?

Penguncian, karantina, dan penutupan sekolah untuk mengendalikan pandemi di banyak negara memiliki dampak berbeda pada para perempuan. Perempuan dan anak perempuan paling diharapkan untuk melakukan peran pengasuhan dalam keluarga, yang berarti lebih sedikit peluang ekonomi dan pekerjaan bagi mereka dan dengan demikian mengingkari hak-hak dasar mereka untuk pengembangan. Kondisi ini diperburuk jika mereka dikarantina dengan pasangan yang kasar karena mereka menghadapi risiko lebih besar akan kekerasan pasangan intim selama wabah. Sayangnya, di banyak tempat ada kurangnya pedoman atau informasi yang signifikan mengenai bagaimana menghubungi polisi, mengakses perawatan medis, dukungan psikologis, atau akses ke tempat penampungan ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi selama pandemi. Di [Inggris](#), misalnya, sementara 25 organisasi membantu korban kekerasan dalam rumah tangga telah melaporkan peningkatan kasus mereka sejak melonjaknya epidemi COVID-19, seperempat mengatakan mereka tidak dapat secara efektif mendukung para korban karena masalah teknis, ketidakmampuan untuk bertemu dengan korban, dan staf sakit.

Selain itu, dengan sumber daya yang telah diperluas dalam memerangi penyebaran virus, banyak otoritas Negara mungkin tidak melihat sebagai akses prioritas ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif untuk para perempuan, yang telah dibatasi oleh hukum, dan adat yang melarang dalam banyak konteks. Ini menghasilkan pembatasan yang signifikan pada hak-hak perempuan untuk kesehatan menstruasi, kesehatan ibu, dan aborsi yang aman.

Perempuan di Tempat Kerja

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional ([ILO](#)), perempuan terlalu banyak diwakili dalam sektor-sektor yang lebih terkena dampak (seperti layanan) atau dalam pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi. [ILO memperkirakan](#) bahwa 58,6 persen perempuan yang bekerja berada dalam sektor layanan di seluruh dunia. Perempuan juga kurang memiliki akses ke perlindungan sosial dan akan menanggung beban yang tidak proporsional di dalam ekonomi perawatan, untuk hal

penutupan sekolah atau sistem perawatan. Pekerja migran perempuan juga rentan terhadap dampak krisis COVID-19, sebagaimana pembatasan perjalanan yang luas membatasi kemampuan mereka untuk mengakses tempat kerja mereka di negara tujuan dan kembali ke keluarga mereka.

Perempuan di Perbatasan: Pengungsi & Pencari Suaka

Ada kekurangan parah akan infrastruktur dan layanan yang aman, selamat dan mudah diakses di sebagian besar kamp-kamp pengungsi dan pemukiman sementara. Pencari suaka saat ini menghadapi masa tunggu yang lama jika pengadilan ditutup karena pandemi, atau lebih buruk, [dikembalikan](#) ke negara asal mereka tanpa memiliki kesempatan untuk mengejar klaim mereka, kadang-kadang melanggar prinsip non refoulement. Ketika virus menyerang lokasi pemukiman yang terlalu sesak, konsekuensinya dapat menjadi bencana besar. Selain itu, dalam pengaturan ini, [penelitian](#) menemukan bahwa perempuan dan anak perempuan sering terpapar pada kekerasan seksual dan eksploitasi ketika mereka dipaksa untuk buang air besar secara terbuka atau berjalan ke fasilitas sanitasi bersama.

Semua Tindakan Negara untuk COVID-19 Harus Responsif Gender

Di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ([ICESCR](#)), Negara memiliki kewajiban untuk mencapai realisasi penuh dari hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ([CEDAW](#)) juga memberikan kewajiban Negara untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang perawatan kesehatan untuk memastikan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses ke layanan perawatan kesehatan, termasuk yang terkait dengan keluarga berencana.

Lebih jauh lagi, kegagalan untuk mengenali dinamika gender akan wabah membatasi efektivitas upaya tanggapan dan akibatnya menghalangi hak-hak perempuan. Agar tanggapan wabah penyakit seperti COVID-19 menjadi efektif dan tidak mereproduksi atau meneruskan ketidaksetaraan gender dan kesehatan, penting agar norma dan peran gender diidentifikasi dan dimasukkan dalam semua langkah sosial ekonomi yang ditetapkan untuk melawan pandemi. Selanjutnya, kesiapsiagaan darurat dan rencana tanggapan harus membahas peran, tanggung jawab, norma sosial, dan kebutuhan khusus perempuan. Negara juga harus memberikan strategi baru bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk dilindungi selama penguncian. Pemerintah harus memasukkan pekerjaan para profesional kekerasan dalam rumah tangga suatu layanan penting dan menyediakan sumber daya darurat bagi organisasi-organisasi anti-kekerasan dalam rumah tangga untuk membantu mereka menanggapi peningkatan permintaan akan layanan. Mereka juga harus mempertimbangkan, cara-cara alternatif, seperti melalui pusat konseling "pop-up", [melaporkan di apotek](#), untuk mendorong para perempuan untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah harus memastikan bahwa semua tindakan untuk memerangi wabah ini responsif gender dan tetap sesuai dengan standar hak asasi manusia. Sementara negara dapat membatasi atau merendahkan akan hak-hak tertentu untuk memenuhi krisis kesehatan masyarakat, pembatasan seperti itu selalu tunduk pada prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas kebutuhan dan non-diskriminasi.

Mengingat bahwa para perempuan sering ditemukan dalam kategori pekerjaan informal yang [lebih rentan](#), misalnya, sebagai pekerja rumah tangga atau pekerja mandiri berbasis rumahan, pihak

berwenang harus meningkatkan akses universal ke layanan kesehatan yang dibiayai secara kolektif untuk semua, termasuk pekerja yang tidak diasuransikan dan keluarga mereka. Negara juga harus [memperluas akses](#) ke cuti sakit berbayar yang dibiayai secara kolektif, tunjangan sakit, dan cuti orang tua atau perawatan untuk memastikan jaminan pendapatan bagi mereka yang sakit, dikarantina atau merawat anak-anak, orang tua atau anggota keluarga lainnya.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa para pencari suka perempuan, pengungsi internal, dan pengungsi dimasukkan dalam pengawasan, kesiapsiagaan, dan rencana tanggapan COVID-19 nasional, dan memastikan bahwa kebersihan menstruasi, reproduksi, dan [komoditas perawatan kesehatan utama](#) lainnya memiliki persediaan yang lengkap dan tersedia.

Pada akhirnya, perspektif, pengalaman, dan suara perempuan yang beragam, termasuk orang-orang LGBTI (sebagaimana diabadikan dalam [Prinsip-Prinsip Yogyakarta](#)), harus dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan seputar langkah-langkah wabah COVID-19 karena tanggapan global yang efektif, terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat harus sejalan dengan hak-hak dan kebutuhan perempuan yang terkena dampak.